BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara merupakan kegiatan yang akan mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat diperlukannya lembaga pengawasan keuangan negara yang didalamnya memiliki kemampuan, mandiri dan profesional yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Sesuai dengan keputusan pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mengatur mengenai tanggung jawab pengendalian intern terletak pada Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan tugas pada instansi pemerintah sesuai yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: PER/05/M.PAN/03/2008. Pengawasan ini mencakup berbagai tugas berbentuk pengauditan, review, evaluasi, mentoring, serta bentuk tindakan pengawasan lainnya.

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia disusun sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah. Auditor sebagai salah satu profesi yang sangat penting, dituntut untuk memahami kode etik profesi dalam

menjaga mutu dan kualitas pemeriksaan. Ini dapat membangun kepercayaan dan memberikan dasar untuk melakukan pengawasan.

Independensi dan objektivitas merupakan salah satu ciri standar dalam Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI). Dalam peraturan AAIPI Nomor PER- 4 01/AAPI/DPN/2021 juga menyatakan bahwa auditor internal harus menjaga sikap netral dan tidak memihak serta untuk selalu menghindari potensi konflik kepentingan.

Objektivitas dan independensi sangat penting bagi auditor internal untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan akurat. Auditor memastikan bahwa hasil audit dapat diandalkan dan akurat, serta memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar profesional. Untuk menjaga objektivitas dan independensi, auditor internal harus selalu merujuk pada standar profesional yang relevan seperti yang ditetapkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). Standar tersebut memberikan panduan tentang bagaimana seorang auditor harus melakukan pekerjaan mereka secara etis sambil memastikan mereka tetap independen dari pengaruh eksternal apa pun.

Selama kegiatan audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam menjalankan tugasnya. Independensi lebih menekankan pada organisasi audit internal, sedangkan objektivitas lebih menekankan pada sikap individu. Meskipun independensi tidak tertulis pada prinsip Kode Etik IIA, namun independensi tetap mempunyai makna tersirat dalam prinsip Kode Etik IIA tersebut. Selain itu objektivitas dimasukkan sebagai salah satu prinsip bersama tiga prinsip lainnya (integritas,

kerahasiaan, dan kompetensi). Auditor tidak boleh menempatkan dirinya pada posisi dimana objektivitasnya dapat dipertanyakan oleh auditee selama melakukan pengawasan.

Di Indonesia, lembaga pengawasan yang bertugas mengawasi keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Salah satu fungsi dari BPKP yaitu pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah, serta pembangunan nasional. Dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ini sebagai aparat pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden, sangat membantu pemerintah dalam pengevaluasian kinerja instansi dan lembaga-lembaga serta usaha-usaha milik pemerintah untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Aparat pengawasan intern dapat meminimalkan tindakan kecurangan dalam penyalahgunaan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan auditor harus memiliki sikap independensi dalam dirinya karena auditor harus mempunyai sikap jujur, tidak mudah terpengaruh dan tidak akan memihak kepada siapapun, karena auditor melakukan pengauditan laporan keuangan hanya untuk kepentingan umum. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Analisis Penerapan Independensi Dan Objektivitas Auditor Pada BPKP Provinsi Sumatera Barat

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah tugas akhir ini yaitu :

1. Bagaimana independensi dan objektivitas auditor yang diterapkan pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja yang mempengaruhi independensi auditor pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana auditor mempertahankan objektivitas dalam proses audit pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari pelaksanaan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan independensi dan objektivitas auditor pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui cara auditor mempertahankan objektivitas dalam proses audit pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang didapatkan dari penulisan Tugas Akhir antara lain :

1. Bagi Universitas

   a. Sebagai bahan bacaan dan menambah referensi penulisan tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Andalas.

   b. Sebagai sarana untuk membina hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Perusahaan.

2. Bagi Penulis

   a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Andalas.

   b. Dapat mengimplementasikan ilmu yang dipelajari selama dibangku kuliah.

   c. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama magang ke dalam dunia kerja setelah lulus dari Universitas Andalas.

3. Bagi Pembaca

   a. Sebagai referensi bahan penelitian lanjutan pada masa yang akan datang.

   b. Penelitian ini dapat menginspirasi peneliti lain untuk mendalami topik yang sama atau sejenis.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diuji kebenarannya, maka penulis menggunakan metode berikut ini :

a. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan penulis melakukan wawancara dengan karyawan yang bersangkutan dan mengumpulkan dokumen-dokumen agar penulis mendapatkan informasi yang lebih akurat.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan mengumpulkan materi atau bahan dari sumber-sumber berupa buku cetak, artikel, laporan-laporan dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan independensi dan objektivitas auditor.

1.6 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan magang dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertempat di Jl. Bypass KM 14, Aie Pacah, Sungai Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25177 Indonesia. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana sistematika penulisannya yaitu bab satu adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, tempat dan waktu pelaksanaan, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab dua merupakan landasan teori yang mendukung teori pendukung yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas penulis, dan bab tiga adalah gambaran umum perusahaan yang menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, motto perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan, serta kegiatan atau aktivitas usaha pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Bab empat adalah pembahasan yang berisikan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan independensi dan objektivitas auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan bab lima bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pelaksanaan magang yang dilaksanakan penulis.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA